

Pengembangan Tata Krama dalam Rangka Pembinaan Nilai Budaya

Soehardi

1. Pendahuluan

Berbicara tentang masalah tata krama pergaulan, rasanya saya seperti akan mengangkat beban yang amat berat. Betapa tidak, bukan saja masalah masyarakat Indonesia yang beraneka ragam, tetapi juga masalah kompleksitas susunan masyarakat dan tata krama masing-masing masyarakat suku bangsa itu telah berkembang dan mencerminkan keadaan yang amat ruwet. Bangunan masyarakat Indonesia terbentuk dari interaksi antara warga-warga masyarakat dari suku-suku bangsa yang berbeda-beda, yang masing-masing suku bangsa telah memiliki tata krama pergaulan dan disiplinnya sendiri, yang sudah mapan dan berbeda satu dengan yang lainnya. Betapa pun begitu, perbedaan norma, tata nilai, sikap dan perbuatan bukanlah merupakan penghalang bagi warga masyarakat suku bangsa yang berbeda untuk berkomunikasi. Selain itu kita memiliki sarana komunikasi yang dapat berlaku untuk semua warga masyarakat Indonesia, yaitu Bahasa Indonesia. Perbedaan adat-istiadat adalah peragaan permukaan belaka, yang menjadi ciri-ciri tipikal mereka, dan tidak dapat disangkal lagi, bahwa perilaku normatif itu cenderung menunjukkan idealisme yang sama, yaitu "tatanan sosial yang terintegrasi secara rapi dan dalam keseimbangan" (Leach, dikutip Kuper, 1991: 156), baik di dalam masing-masing masyarakat suku bangsa, maupun interaksi antar warga suku bangsa di dalam bangunan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

"Masyarakat dapat diibaratkan sebagai suatu organisme" (Radcliffe-Brown, dikutip Kuper, 1991:49) yang masing-masing bagian atau lembaga diadakan untuk menyangga terwujudnya tatanan dan ketertiban sosial secara keseluruhan. Kehidupan masyarakat pada prinsip-

nya terarah pada tujuan keteraturan dan ketertiban, di mana hubungan-hubungan interaksi berlangsung antara kedudukan-kedudukan, peran-peran dan harapan-harapan sosial terorganisasi secara tepat, teratur dan berkesinambungan dalam jangka waktu yang relatif lama. Lembaga kemasyarakatan berfungsi sebagai arena individu dapat memuaskan kebutuhannya dan saling berinteraksi atas dasar norma-norma yang berlaku. Dalam pertalian inilah tata krama memainkan peran utama.

Tata Krama, sering juga disebut sebagai adat sopan santun, diperagakan atas dasar aturan-aturan adat atau norma, dalam pertalian hubungan-hubungan sosial, pergaulan sosial, yaitu interaksi antar individu warga suatu masyarakat yang masing-masing individu menduduki posisi sosial tertentu. Masing-masing individu diharapkan memperagakan peran tertentu sesuai dengan kedudukan yang sedang dimainkannya berupa tindakan-indakan yang mencerminkan kewajiban dan hak-hak. Tata Krama adalah perilaku normatif yang mencita-citakan keteraturan dan ketertiban masyarakat. Dengan demikian tata krama adalah ceminan kerukunan, keselarasan dan ketenteraman. Dalam suasana seperti ini, masing-masing orang menyadari sepenuhnya akan kedudukannya, dan tahu secara tepat perbuatan apa yang harus dilakukan terhadap individu di sekitarnya. Ada dua tipe dasar hubungan antar kedudukan yaitu: pertama berupa pertalian sederajat, misalnya interaksi antara teman sejawat, teman seusia, antara tetangga, atau teman kerja; kedua pertalian antar derajat atau hubungan secara hierarki. Peragaan tata krama dalam pola-pola interaksi di dalam dua jenis hubungan ini sering kali mencerminkan bentuk-bentuk perilaku hormat. Prinsip rukun dan hormat agaknya merupakan norma-

norma dasar bagi tata krama pergaulan dalam setiap masyarakat, sekali pun penampilannya dapat saja beraneka ragam. Paling sedikit prinsip ini menjadi dasar jati diri masyarakat Jawa. Oleh karena itu dalam makalah ini saya akan memaparkan prinsip rukun dan hormat dalam masyarakat Jawa sebagai ilustrasi konseptual dan faktual.

Namun kita harus juga menyadari bahwa tidak semua individu dalam suatu masyarakat selalu berperilaku sesuai dengan adat istiadat. Dalam suasana modern dan arus globalisasi, ada banyak sumber-sumber informasi yang menyediakan banyak pilihan-pilihan perbuatan, yang ditawarkan oleh media pendidikan, media cetak dan elektronika, seperti surat kabar, majalah, buku, radio, film, televisi dan komputer. Norma-norma baru yang sesuai dengan kepribadian dan tatanan lama dapat saja diterima dengan cara disesuaikan dan diintegrasikan ke dalam adat istiadat tertentu yang menyebabkan benturan-benturan dalam pergaulan sehari-hari, yang pada gilirannya dapat menimbulkan pertentangan sosial yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat, misalnya perilaku *nyleneh* yang cenderung ugal-ugalan, mabuk-mabukan, bergadang di jalan dengan musik gaduh, kebut-kebutan sampai pada perbuatan kejahatan.

Berdasarkan pemahaman dari uraian di muka, maka kita dapat berasumsi bahwa tata krama pergaulan dapat berfungsi sebagai pengendalian sosial, karena ini meliputi hal-hal yang baik dilakukan dan hal-hal yang tidak baik dilakukan. Maka prinsip pengendalian sosial adalah amat penting untuk dipahami, agar dapat dipakai sebagai landasan bagi disiplin nasional dan diharapkan dapat berfungsi sebagai penangkal budaya asing yang berpengaruh negatif.

Perwujudan interaksi sosial yang mencerminkan potret tata krama dapat dilihat dalam formasi dan berfungsinya lembaga-lembaga sosial atau institusi, seperti: lembaga keluarga dan kerabat, pendidikan, hukum, agama, ekonomi dan industri, seni dan rekreasi, dan lembaga birokrasi dan organisasi sukarela. Di dalam lembaga itu, individu-individu warga masyarakat berperan sebagai elemen-

elemen yang saling berhubungan dengan menampilkan pola-pola interaksi yang bervariasi sesuai dengan kedudukan yang sedang dimainkannya. Dalam makalah ini saya hanya akan menyoroti pola-pola pergaulan dalam lembaga-lembaga keluarga, dan pendidikan yang sarat dengan etika dan moral atau tata krama.

2. Pengendalian Sosial Sebagai Dasar Tatanan Sosial

Menurut Koentjaraningrat (1977: 206) "kehidupan suatu masyarakat dalam garis besarnya menurut suatu kompleks tata kelakuan yang kita sebut adat istiadat. Kompleks tata kelakuan atau adat istiadat itu dalam praktek berupa cita-cita, norma-norma, pendirian, kepercayaan, sikap, aturan, hukum, undang-undang dsb, yang mendorong kelakuan manusia". Dengan demikian, norma, cita-cita, kepercayaan, sikap, pendirian, aturan, hukum dan undang-undang itu berfungsi sebagai pengendali tingkah laku individu dalam suatu masyarakat. Agaknya pemahaman ini sekali pun bersifat komprehensif, tetapi hanya bersifat umum, dan tidak mencermati adanya kategori-kategori pengendalian dari asal sumber yang berbeda.

Ross (1901, dikutip Martindale, 1978: 46) menyatakan bahwa "tatanan dan ketertiban sosial dikendalikan oleh dua sumber kekuatan utama. Pertama, tatanan dan ketertiban sosial spontan yang dikendalikan oleh adat istiadat, yaitu norma-norma etika dan moral yang tidak memerlukan campur tangan kekuasaan memaksa dari luar komunitas. Kedua, tatanan dan ketertiban buatan yang dikendalikan oleh kekuatan hukum, peraturan dan undang-undang, dan yang dilaksanakan oleh perangkat aparat kekuasaan memaksa dari tingkat pusat sampai tingkat distrik dan desa, seperti lembaga birokrasi pemerintah, kepolisian dan perangkat peradilan. Pada sistem ini, masing-masing individu warga masyarakat diperlakukan sebagai subyek hukum yang otonom, dan diberi hak kebebasan bertindak secara bertanggung jawab sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku. Dalam pertalian ini prestasi individu dihargai, dan diselaraskan de-

ngan kepentingan tatanan dan ketertiban masyarakat umum. Persaingan yang wajar dalam mengembangkan prestasi untuk memperoleh prestise dijamin undang-undang. Sistem manajemen dan pengendalian sosial model ini, pada umumnya dikenal berasal dari masyarakat dunia Barat, yang menempatkan potensi individu dan paham demokrasi yang menentukan arah dan bentuk masyarakatnya.

Jika dicermati sistem pengendalian sosial yang pertama menempatkan masyarakat dengan perangkat adat istiadatnya secara dominan menentukan arah perilaku individu-individu yang menjadiarganya. Otonomi individu dengan penampilan kepribadiannya memainkan peran yang agak terbatas, dan kepentingan individual diselaraskan secara harmonis dengan kepentingan kolektif masyarakat. Masyarakat dunia Timur, termasuk masyarakat di Indonesia dapat dikategorikan dalam sistem pengendalian sosial tipe kolektif ini, di mana kepentingan ketertiban umum diutamakan daripada kepentingan individu. Kepentingan individual sebaiknya agak disembunyikan dan sedapat mungkin diselaraskan dengan kepentingan umum. Perwujudan dari sistem pengendalian sosial tipe ini adalah sistem kerja bersama dalam kaitannya dengan sistem gotong royong dan tata krama pergaulan yang amat canggih. Kerukunan semacam ini, menurut Ross (1901, dikutip Martindale, 1978:46) dilandasi oleh "empat sifat dasar manusia-simpati (*tepa seliro*), keramahan, rasa keadilan, dan kepentingan pribadi yang selaras dengan tatanan sosial menurut adat istiadat". Masyarakat suku-suku bangsa di Indonesia, sampai batas-batas tertentu, mencerminkan tipologi kolektif ini.

Kini di tengah-tengah proses modernisasi dan globalisasi komunikasi melanda dunia, masyarakat di Indonesia, mau tak mau, telah dirasuki kekuatan intergratif di luar norma-norma primordial, yaitu kekuatan peraturan dan hukum positif. Maka sebagai akibatnya, di samping terjadinya integrasi struktural yang ditandai hubungan-hubungan normatif kolektif dan diwarnai nilai-nilai rukun dan hormat, juga terjadi hubungan-hubungan fungsional yang ditandai oleh pembagian

kerja kearah spesialisasi yang renik. Perangkat pengendalian dan pengaturan sosial dalam hubungan fungsional, kita tidak dapat menerapkan norma-norma primordial yang kolektif, maka perangkat peraturan dan hukum beserta aparatnya dapat memainkan peran secara tepat.

Dalam makalah ini, saya akan lebih menekankan bahasan pada sistem pengendalian integrasi sosial model yang pertama, di mana nilai rukun dan hormat mendasari tata krama pergaulan sehari-hari dalam masyarakat luas. Tingkah laku tata krama, *trapsila*, *unggah-ungguh*, yang dipelajari individu sejak awal proses sosialisasinya dalam keluarga dan komunitasnya diduga berpengaruh besar pada sopan santun hubungan interaksi di arena hubungan struktural maupun fungsional.

3. Nilai Rukun dan Hormat Sebagai Dasar Tata Krama

Sistem nilai adalah suatu cara berfikir dan bersikap warga suatu masyarakat tentang apa yang dianggap mempunyai makna penting dan berharga. Berdasarkan cara berfikir tertentu, manusia Indonesia memandang nilai rukun dan hormat memiliki makna amat penting dan berharga dalam hubungan interaksi dengan sesamanya. Cara berfikir seperti inilah yang kiranya memberi arah dan bentuk nyata hubungan-hubungan sosial dalam masyarakat di Indonesia. Hildred Geertz (1985: 151), dari hasil penelitiannya di Jawa Timur, menyatakan bahwa "kedua-duanya bukan saja merupakan petunjuk moral yang mendasari tindak-tanduk kekeluargaan Jawa, melainkan malah merupakan pusat pengertian baginya. Yang pertama ialah sekelompok nilai yang berkenaan dengan pandangan *Kejawen* tentang tata krama 'penghormatan', dan yang kedua nilai-nilai berkenaan dengan pengutamaan orang Jawa terhadap terpeliharanya 'penampilan sosial yang harmonis'".

Nilai yang pertama ialah ungkapan yang tepat atas 'hormat' yang didasarkan atas pandangan tradisional *Kejawen*, bahwa semua hubungan kemasyarakatan tersusun secara hierarkhis, serta di atas kewajiban moral untuk memelihara

dan menyatakan corak tertib sosial yang demikian itu merupakan kebaikan. Nilai yang kedua dinamakan 'rukun' ialah diterapkan untuk memelihara keadaan sosial yang tenteram dan harmonis, dengan memperkecil suasana pertengkaran, baik dalam masyarakat maupun antar pribadi. Pertengkaran sebaiknya dijaga jangan sampai pecah ke permukaan dan sebaiknya disembunyikan dalam bentuk diam-mendiamkan (*nengnengan*) atau *jothakan* pada tingkat usia anak-anak. "Kedua prinsip itu merupakan kerangka normatif yang menentukan bentuk-bentuk kongkret semua interaksi" (Magnis-Suseno, 1988: 38). Saya memulai pembahasan tentang nilai rukun.

4. Nilai Rukun

Menurut Magnis-Suseno (1988: 39), "prinsip kerukunan bertujuan untuk mempertahankan masyarakat dalam keadaan yang harmonis. Rukun berarti berada dalam keadaan selaras, tenang dan tenteram, bersatu dalam maksud untuk saling membantu". Keadaan rukun dilukiskan bahwa semua orang dan semua pihak berkeinginan dan bertindak ke arah suasana damai, saling membantu dan bekerja sama, saling menerima dengan tenang dan sepakat. Rukun adalah suasana yang dicita-citakan dan diharapkan dapat dipertahankan dalam semua hubungan-hubungan sosial seperti dalam hubungan-hubungan anggota keluarga, dalam kelompok-kelompok, dalam rukun tetangga, kampung, desa, dan kota.

Berperilaku rukun berarti warga suatu masyarakat harus mau menghindari pertengkaran yang tajam atau menyembunyikan dengan ungkapan *neng-nengan* antar pribadi atau akomodasi perdamaian lewat musyawarah manakala pertengkaran terjadi antar kelompok. Sehingga masyarakat menjadi kelihatan damai dan tenteram, sekali pun kadang kala kedamaian itu bersifat semu. Dalam keadaan terakhir itu, cara-cara *ngrasani* atau gosip merupakan mekanisme utama.

Dalam kaitan ini, lebih lanjut Magnis-Suseno (1988: 39) berpendapat ada dua hakekat dalam prinsip kerukunan. Pertama, dalam pandangan Jawa masalahnya bukan penciptaan keadaan kese-

larasan sosial, melainkan berlaku rukun agar supaya tidak mengganggu keselarasan yang diandaikan sudah ada. Ini berarti dalam pandangan orang Jawa, bahwa suasana kerukunan, ketenangan, dan keselarasan sosial itu sudah terbina dan merupakan keadaan normal, selama tidak terganggu oleh munculnya pertengkaran-pertengkaran. Oleh sebab itu, pertengkaran sebaiknya dihindari dengan sikap tata krama yang halus, atau disembunyikan dengan cara *neng-nengan* tadi. Maka sikap rukun berarti usaha untuk menghindari pecahnya konflik-konflik.

Kedua, prinsip kerukunan tidak menyangkut suatu sikap batin, atau keadaan jiwa, melainkan penjagaan keselarasan dalam pergaulan, yang diatur adalah permukaan hubungan-hubungan sosial yang kentara, yang perlu dicegah ialah konflik yang terbuka. Memang hakekat nilai kerukunan adalah terbinanya hidup selaras dan tenteram. Ini terselenggara jika ketenteraman masyarakat terhindar dari pertengkaran. Sedang yang dimaksud sikap batin orang Jawa menurut Magnis-suseno ini agaknya menyangkut soal perasaan hati, artinya sikap orang Jawa dalam berpartisipasi dalam kerukunan dengan cara menghindari pertengkaran itu, sebenarnya bukan merupakan sikap kata hatinya, dengan kata lain perasaan hati yang setengah-setengah, dan ini tidak ada kaitannya dengan rasa batin orang Jawa yang paling dalam. Padahal, menurut saya, ketenteraman dan keselarasan masyarakat dapat saja merupakan pancaran ketenteraman dan keselarasan batin tiap-tiap individu dalam masyarakat. Tiap-tiap individu Jawa itu selalu mendambakan keselamatan dan ketenteraman batin, baik itu dalam diri sendiri, dalam keluarga, maupun dalam hidup bermasyarakat. Cita-cita ini diupayakan dengan penyelenggaraan upacara-upacara, baik itu berupa upacara keselamatan dengan persembahan sajian, maupun dengan pengendalian diri lewat pengheningan cipta. Manakala tiap individu Jawa secara batiniah mengalami rasa tenteram dan selamat, serta mampu mengendalikan emosi, maka tingkah lakunya menjadi lebih halus, sopan, *lembah manah*, inilah yang membentuk suasana damai dan selaras. Menurut Hildred

Geertz (1985: 151), nilai rukun didasarkan pada "pandangan *Kejawen* tentang keseimbangan emosional, keselarasan emosional, sebagai nilai tertinggi, dan didasarkan pula pada kewajiban moral yang berkaitan dengan nilai itu untuk mengendalikan hasrat hati sendiri, menjaganya agar tidak terlepas dari kesadaran, atau setidaknya tidak terucapkan, sehingga dengan demikian tidak menimbulkan tanggapan emosional yang berlawanan dari pihak orang lain. Maka dalam pandangan orang Jawa, keselarasan dan ketenteraman hidup bermasyarakat adalah pancaran dari keselarasan dan ketenteraman batin manusia Jawa itu sendiri.

5. Nilai Hormat

Setiap hubungan interaksi antara dua individu dapat diamati bahwa setiap orang dalam sikapnya, caranya berbicara dan caranya membawa diri menunjukkan nilai hormat secara timbal balik sesuai dengan derajat dan kedudukannya. "Sikap hormat bagi orang Jawa berarti pengakuan terhadap golongan atasan yang diperagakan melalui perilaku tata krama yang sesuai" (Hildred Geertz, 1985: 152). Menurut Koentjaraningrat (1977: 174), bahwa "perbedaan kedudukan dan derajat terhadap individu-individu dalam masyarakat itulah yang menjadi dasar dan pangkal bagi gejala pelapisan sosial yang ada dalam hampir semua masyarakat". Ini terjadi jika perbedaan kedudukan itu telah mencapai suatu tingkat yang amat jelas seperti golongan kaya dan golongan miskin, golongan abangan dan santri, atau golongan priyayi dan golongan rakyat biasa. Dalam setiap lapisan itu pun masih kita jumpai perbedaan-perbedaan kedudukan (status), misalnya dalam satu keluarga batih pun kita dapat menjumpai kedudukan suami yang berbeda dengan kedudukan anak-anak mereka. Di antara anak-anak sendiri ada kedudukan kakak laki-laki atau perempuan dan kedudukan adik laki-laki atau perempuan. Hubungan interaksi antar posisi sosial itu ditandai dengan sikap hormat.

Oleh sebab itu, Hildred Geertz (1985: 151) menyatakan bahwa "prinsip hormat berdasarkan pendapat bahwa semua hubungan dalam masyarakat teratur se-

cara hirarkis". Bahwa keteraturan hirarkis itu bernilai pada dirinya sendiri, dan oleh karena itu orang wajib mempertahankannya dan untuk membawa diri sesuai dengannya. "Apabila dua orang bertemu, terutama dua orang Jawa, bahasa pembawaan dan sikap mereka mesti mengungkapkannya suatu pengakuan terhadap kedudukan mereka masing-masing dalam suatu tatanan sosial yang tersusun dengan terperinci dan cita rasa. Mengikuti aturan-aturan tata krama yang sesuai, dengan mengambil sikap hormat atau kebapaan yang tepat adalah amat penting" (Magnis-Suseno, 1988: 60).

Kedudukan sosial, di mana pun, bertingkat-tingkat, artinya seseorang mungkin berkedudukan tinggi pada suatu jenjang tataran, tetapi rendah pada jenjang yang lain" (Hildred Geertz, 1985: 23). Tingkat-tingkat jenjang itu dapat menyangkut hal-hal seperti jenis kelamin, umur, kekayaan, jabatan, pangkat dan pendidikan.

Hubungan interaksi antar kedudukan dalam masyarakat, di mana individu-individu sudah saling mengenal, sikap dan nilai hormat menunjukkan juga jarak sosial. Jarak sosial mengacu pada hubungan dekat atau jauh, akrab atau pertengkaran, diukur dengan pembawaan sikap dan bahasa yang diterapkan, baik kepada kedudukan orang yang sudah dikenal maupun yang belum. "Orang harus bertegur sapa dengan hormat kepada siapa pun yang tidak terlalu dikenal, bukan saja karena kehati-hatian agar tidak menyakiti hati, melainkan juga karena di dalam hormat itu terkandung ungkapan tentang adanya jarak, dan oleh karenanya menjadi spesifikasi lebih lanjut dalam hubungan di antara kedua orang itu" (ibid:23).

Sikap hormat diperagakan dengan berbagai cara sekaligus yaitu sikap badan, tangan, kepala, kepala menunduk, nada suara rendah, istilah-istilah menyapa bahasa dengan tingkatan-tingkatan kata yang digunakan dan juga dengan urutan duduk. Penetapan sikap hormat ini disesuaikan dengan siapa seseorang sedang berbicara, artinya memperhitungkan kedudukan di antara keduanya. Prinsip ini berdasarkan pada "cita-cita tentang suatu masyarakat yang teratur baik,

di mana setiap orang mengenal tempat dan tugasnya dan dengan demikian ikut menjaga agar seluruh masyarakat merupakan suatu kesatuan yang selaras" (Magnis-Suseno, 1988: 60). Mereka yang berkedudukan tinggi harus diberi hormat; sedangkan sikap hormat yang tepat terhadap orang yang berstatus lebih rendah atau bawahan adalah sikap kebapaan atau keibuan dan sikap melindungi mereka. Orang bawahan biasanya merasa dihormati bila ia disapa dan diajak bicara oleh atasan dengan sikap apa pun juga. Mereka merasa dianggap memiliki suatu posisi, sekali pun rendah, dikalangan kaum atasan dan merasa dimanusiakan (*diwongke*).

Koentjaraningrat (1969: 42) juga melukiskan keadaan yang sama, yang dicirikan sebagai mentalitet priyayi. Bahwa sikap hormat itu sebaiknya diorientasikan kepada kelakuan pemimpin, tokoh-tokoh atasan, orang tua-tua dan senior. Orang-orang tinggi dan orang itu harus dilayani dan dihormati secara luas. Mereka itu semestinya menjadi panutan dalam masyarakat. Sedang sikap bawahan atau golongan kebanyakan beranggapan bahwa seolah-olah ia memperoleh kehormatan jika ia dapat berpartisipasi dalam pergaulan priyayi itu, dengan cara memberi bingkisan atau pelayanan kepada lapisan atas itu. Unsur nilai budaya hormat jika diperagakan secara berlebihan, sesungguhnya tidak cocok dengan alam pembangunannya sekarang ini. Nilai ini semestinya diterapkan secara sewajarnya menurut norma yang berlaku.

6. Tata Krama Sebagai Perwujudan Pengendalian Sosial

Peragaan tata krama sebagai perwujudan pengendalian sosial berlangsung secara terus menerus dalam kehidupan sehari-hari dalam arena lembaga sosial seperti keluarga, kerabat, hubungan ketanggaaan, pendidikan, agama, ekonomi dan industri, lembaga birokrasi dan organisasi suka rela. Berlaku sopan dengan sikap rukun dan hormat mendominasi pergaulan sosial sehari-hari dengan tujuan agar suasana masyarakat tetap aman dan teratur rapi. Orang akan memperoleh penghargaan dan dihormati,

manakala sikap dan perbuatannya mencerminkan nilai rukun dan hormat.

Pertentangan biasanya muncul manakala kepentingan-kepentingan individual yang berbeda-beda saling berbenturan. "Mengusahakan keuntungan pribadi tanpa memperhatikan persetujuan masyarakat, berusaha maju sendiri tanpa mengikutsertakan kelompok dinilai kurang baik. Individu seharusnya selalu bertindak bersama dengan kelompok" (Magnis-Suseno, 1988: 40). Oleh sebab itu, orang dianggap tidak pantas jika berusaha mengembangkan ambisi-ambisi pribadi. Masyarakat mengharapkan individu warganya agar tidak mengembangkan persaingan satu sama lain. "Ambisi, persaingan, kelakuan kurang sopan, dan keinginan untuk mencapai keuntungan material dan kekuasaan pribadi merupakan sumber bagi segala perpecahan, ketidakselarasan dan kontradiksi yang seharusnya ditindas dan dicegah" (Mulder, 1978: 41).

Pertengakaran dalam masyarakat timbul biasanya diakibatkan oleh munculnya emosi-emosi dalam hubungan sosial. Dalam pertalian ini, orang Jawa telah mengembangkan suatu norma untuk mencegah meledaknya emosi secara terbuka. Norma itu adalah "norma yang dapat dirangkum dalam tuntutan untuk selalu mawas diri dan menguasai emosi" (Magnis-Suseno, 1988: 41). Pengendalian emosi dengan cara mawas diri dapat dicapai melalui sikap yang tenang, tidak cepat kaget atau bingung terhadap lontaran kata, sikap dan perbuatan orang lain terhadapnya. Kaum priyayi Jawa amat berpengalaman dan memiliki keterampilan istimewa dalam seni mawas diri dan menguasai emosi ini. Warga rakyat biasa umumnya juga meniru perilaku priyayi itu dan khusus bagi anak-anak muda memang masih harus melatih ketrampilan mawas diri dan menguasai emosi ini. Seorang priyayi yang berorientasi kraton akan kelihatan kemampuannya dalam berbicara menggunakan bahasa yang amat halus, baik tingkat bahasa *krama inggil*, *krama madya* maupun *ngoko* disertai sikap tenang tanpa menunjukkan emosi meluap. Priyayi birokrat dan cendekiawan pun kini cenderung meniru tata krama ini. Bukan lemah lem-

butnya yang sebaiknya ditiru sebenarnya, melainkan mawas diri dan pengendalian emosi itulah yang sebaiknya ditiru.

Sekalipun begitu, otonomi pribadi dalam masyarakat Jawa sesungguhnya tidak ditenggelamkan sepenuhnya dalam kepentingan kolektif. Kepentingan kelompok diutamakan sepanjang tidak melanggar kepentingan individu yang pokok seperti pengurusan ekonomi dan otonomi keluarga, harta milik individu dan keluarga dijamin sepenuhnya. Kepentingan pokok individu ini amat cocok sistem hukum yang diatur oleh aparat superstruktur. Hidup pribadi individu berlangsung dalam keluarga inti, suatu lingkungan di mana individu dapat mengembangkan diri dengan tata krama yang perlindungan keamanan dan memperoleh pendidikan awal dalam hal tata krama normatif dan etika agama.

7. Tata Krama dalam Keluarga

Pergaulan dalam keluarga, baik itu keluarga inti maupun luas amat ditentukan oleh cara masyarakat mengatur hubungan garis keturunan dan sistem perkawinan. Pada prinsipnya ada paling sedikit tiga jalur garis keturunan, yang ketiganya dapat dijumpai di Indonesia. Pertama garis keturunan melalui jalur laki-laki, yang dikenal dengan konsep patrilineal, di mana tiap keluarga dalam suatu masyarakat digolongkan ke dalam suatu marga atau klen. Perkawinan dilangsungkan antar klen, di mana melalui perempuan diambil dari marga lain dan dibawa masuk menjadi anggota klen suami. Suku bangsa Batak di Sumatra Utara dan suku bangsa Bali adalah contoh di Indonesia. Kedua perhitungan garis keturunan melalui jalur wanita, yang dikenal dengan konsep matrilineal, di mana tiap keluarga diklasifikasikan ke dalam suatu marga jalur ibu. Perkawinan juga dilakukan antar marga. Misalnya suku bangsa Minangkabau di Sumatra Barat. Ketiga, garis keturunan diperhitungkan melalui keduanya, baik jalur laki-laki maupun jalur perempuan, dan yang dikenal dengan konsep bilateral atau parental. Perkawinan dapat dilakukan antara keluarga-keluarga inti, sepanjang tidak melanggar adat inses. Sistem ini berlaku dalam masyarakat seperti di Jawa,

Sunda dsb. Maka dalam pembahasan tata krama mengambil contoh keluarga Jawa.

Dalam masyarakat Jawa, menurut Hildred Geertz (1985: 4), telah berkembang hubungan-hubungan struktural dan fungsional yang begitu kompleks, di mana pertalian keluarga inti (*sopan*) dengan ikatan-ikatan sosialnya yang ketat, khas dan askrifik itu hanya memainkan peranan yang sekedarnya. Pada hal dalam masyarakat tradisionalnya, somah ini merupakan kekuatan ekonomi, politik, sosial dan bahkan keagamaan. Sekalipun somah memberi sumbangan sekedarnya terhadap bekerjanya masyarakat Jawa secara keseluruhan, tetapi sumbangan sedikit itu sangat penting artinya bagi ketenangan dan kesinambungan masyarakat Jawa. Di dalam somah itu kebutuhan-kebutuhan pribadi, ekonomi, sosial dan psikologis para anggota terpenuhi, dan nilai-nilai sosial-budaya diwariskan dan dikukuhkan. Selain hubungan ke dalam, maka somah juga berfungsi sebagai suatu kesatuan dalam hubungannya dengan somah-somah lainnya dalam lingkup ketetanggaaan. Masing-masing anggota somah memainkan peran yang berbeda-beda dalam hubungan ini. Suami misalnya berperan dalam kaitan dengan rapat-rapat rukun tetangga, gotong royong, ekonomi produksi dsb., sedang isteri berkaitan dengan ekonomi konsumsi, sumbang menyumbang, dan peran-peran dalam PKK dan tenaga rewang.

Secara tradisional dalam somah, suami adalah kepala keluarga, dan isteri dikategorikan lebih muda atau adik dari suami. Oleh sebab itu, isteri sering ditempatkan sebagai *konco wingking*, dan dalam pergaulan suami ditempatkan sebagai kakak dengan sapaan *kakang* atau *kakangmas*, sedang isteri dengan sapaan adik atau dik. Bilamana mereka telah memiliki anak pertama, maka mereka saling menyapa dengan sebutan *bapake* atau *ibuke/mbokne* - nama anak pertama itu dan berlaku untuk seterusnya. Dalam pergaulan sehari-hari di antara keduanya berlaku saling menghormati, tetapi diperagakan dengan cara yang berbeda, sang isteri tampak lebih jelas sikap dan perilaku pernghormatannya. Misalnya dalam

keluarga bangsawan, isteri umumnya berbahasa krama dan krama inggil kepada suaminya, dan sang suami menganggapnya dengan berbahasa ngoko dicampur dengan kata-kata krama inggil. Suasannya menjadi cukup berbeda, manakala hubungan suami-isteri itu terjadi pada keluarga rakyat biasa atau priyayi prestise. Secara timbal balik mereka berbicara memakai bahasa Jawa ngoko, dan kadang-kadang dalam keluarga priyayi prestise ini bahasa ngoko dapat dicampur dengan krama inggil, atau ada yang berbahasa Indonesia.

Hubungan pergaulan antara ayah dengan anak-anak biasanya bersifat lebih forsal dan menunjukkan adanya jarak. Sifat formal adanya jarak dan sering pula kaku adalah sebagai tanda tata krama penghormatan, dan yang dibakukan dengan ungkapan Jawa: *wedi*, *isin*, dan *sungkan* (Hildred Geertz, 1985; Magnis-Suseno, 1988). Anak, baik laki-laki maupun perempuan, berbicara bahasa Jawa krama dan krama inggil terhadap ayahnya, sebaliknya ayah memakai bahasa ngoko. Hubungan formal, adanya jarak ditandai adanya tata krama penghormatan yang kaku, sehingga anak tidak diperkenankan berlaku sembarangan kepada ayahnya. Pelanggaran terhadap norma ini, anak dianggap *nracak* dan akan menghadapi hukuman sakral yaitu *kuwalat*. Bisa jadi dalam masyarakat desa anak-anak berbicara ngoko terhadap ayahnya, namun tidak mengurangi tata krama penghormatan formal dan hukuman *kuwalat* di atas.

Begitu pula hubungan antara ibu dengan anak-anaknya menunjukkan ciri-ciri formalitas dan adanya jarak, tetapi kadar formalitas dan jaraknya lebih kecil dibanding dengan posisi ayah. Dalam keluarga bangsawan anak-anak tetap berbicara krama dan krama inggil terhadap ibunya, sedang ibu berbicara ngoko dicampur krama inggil terutama kepada anak laki-laki yang telah dewasa. Suasana seperti ini tidak dapat dijumpai di pedesaan dan kalangan priyayi prestise. Pada kalangan priyayi prestise bisa jadi agak sama dengan hubungan ibu-anak pada bangsawan, hanya di sini ibu umumnya berbicara ngoko saja terhadap anaknya. Sedang pada kalangan rakyat

biasa, antara ibu dan anaknya berbicara ngoko saja. Larangan *nracak* dan hukuman *kuwalat* berlaku pula dalam hubungan ini.

Pola hubungan dalam keluarga-keluarga yang lebih luas dari somah bersifat klasifikatoris. Antara anak dengan generasi ayah atau ibu dan juga generasi di atasnya, pola tata krama yang dipakai kurang lebih sama dengan yang diterapkan terhadap ayahnya. Hubungan mereka itu disifatkan hubungan jauh dengan jarak sosial yang kentara. Istilah sapaan juga bersifat klasifikatoris, tetapi ada perbedaan di antara jenis kelamin. Semua kakak laki-laki ayah maupun ibu disapa dengan *pakde*, dan yang perempuan dengan *bude/mbokde*. Prinsip yang sama berlaku pula untuk sapaan dengan adik-adik laki-laki maupun perempuan ayah dan ibu, hanya istilah sapaannya berbeda. Untuk adik laki-laki ayah-ibu disapa dengan paman atau *paklik*, untuk adik perempuan ayah-ibu dengan sapaan *bulik* atau *mbok cilik*.

Bagaimanapun juga dalam kenyataan sehari-hari ada banyak ragam variasi pergaulan, sebab dalam alam kemajuan sekarang ini sumber informasi telah terbuka luas. Norma tingkah laku tradisional bukanlah satu-satunya sumber orientasi orang untuk berbuat. Ada banyak pilihan-pilihan perbuatan yang diinformasikan oleh TV, film, radio, surat kabar dsb, misalnya minuman keras, perilaku kekerasan, perkosaan sampai perbuatan kriminal yang sudah merambah kalangan anak muda kita. Jika ini dibiarkan dapat saja menyebabkan dekadensi moral.

5. Arena Pendidikan

Somah di mana pun juga merupakan tempat awal dimulainya pendidikan anak-anak. Pola pendidikan keluarga inti Jawa ditekankan pada cita-cita ketenangan dan ketenteraman somah maupun masyarakat umum. Prinsip rukun dan hormat diajarkan semenjak anak-anak pada tahun-tahun awal hidupnya. Menurut Hildred Geertz, pola pengajaran anak-anak Jawa adalah penekanannya pada pengekanan, untuk membentuk nilai rukun dan hormat itu. "Mengasuh bayi pada umumnya, mulai dari kain pembudungnya (*gedhong*) yang lembut sam-

pai pada buaian selendang di pinggang ibunya yang aman, serta usaha yang terus-menerus menghindari setiap kejutan yang tidak nyaman, semuanya diarahkan kepada terbangkitnya sikap yang amat pasif. Walaupun pengendalian diri dan kepasifan tersebut tidak sama, pendekatan yang secara pasif terhadap dunia itu menyebabkan pengekan diri pun luar biasa mudah (1985: 154). Pengajaran kepasifan ini berlangsung terus sepanjang masa kanak-kanak dengan menekankan perilaku sopan santun yang halus. Misalnya anak dibiasakan menggunakan tangan kanannya dalam setiap aktifitas yang baik dan bersih. Bila anak balita diajari salim (salam hormat) kepada orang-orang senior atau menerima pemberian, ia tidak boleh mengacungkan tangan kirinya, karena dianggap tidak sopan. Maka si ibu dengan tergepoh-gepoh menarik kembali tangan kiri anaknya itu dan menarik tangan kanannya untuk diacungkan disertai dengan nasehat-nasehat yang lembut, sekaligus secara kiasan meminta maaf kepada sang senior dengan mengatakan bahwa anak belum tahu diri. Cara pengajaran tata krama yang tepat dalam kaitan ini tidak beresesuaian dengan cara menggendong anak balita, yaitu anak diposisikan di pinggang ibu sebelah kiri, sehingga tangan kanan sang anak berada di punggung ibu, dan tangan kiri berada di depan, dan bebas siap digunakan. Sama halnya dalam mengajarkan kata permintaan 'nyuwun' dengan sikap hormat diulangi terus menerus.

Pengajaran untuk menanamkan disiplin dengan cara menakutkan anak agar berperilaku baik yaitu melalui peringatan-peringatan semacam ancaman hukuman terhadap perbuatan tidak baik. Disiplin diajarkan dengan cara menakutkan anak, misalnya jika anak tidak mau tidur ia akan melihat momok, atau jika anak nakal maka akan digigit anjing dsb. Pendidikan awal dalam keluarga berfungsi untuk membentuk jiwa anak. Sedang pendidikan formal di sekolah adalah lanjutan pembentukan jiwa dan watak anak didik tersebut.

Hubungan antara guru dan murid di sekolah, diatur peraturan-peraturan yang formal dan sepenuhnya bersifat sekuler.

Tata Krama penghormatan terhadap guru juga didasari dengan prinsip: *wedi, isin, dan sungkan*, seperti dalam tata krama somah. Namun pelanggaran dalam tata krama pergaulan guru-murid tidak dijumpai hukuman sakral, seperti *kuwalat*, dan hukuman pelanggaran sopan santun hanya bersifat mengembalikan kedisiplinan dan cara nasehat. Perilaku murid yang brutal agaknya bersumber dari lingkungan somah maupun sekolah. Cara pengasuhan anak dan pemanjaan yang dituding sebagai biang keladi pembentuk watak kebrutalan, juga lingkungan pergaulan di sekolah dan di luarnya. Tidak kurang pentingnya adalah perilaku guru, apakah Guru masih memerankan panutan *digugu lan ditiru*. "Guru sebagai pendidik, penasehat, dan pemberi contoh tidak diperbolehkan berlaku sembarangan berbuat, lebih-lebih sewaktu di depan kelas atau sedang bercakap-cakap dengan murid" (Mulyadi, 1990: 98).

9. Penutup

Betapapun ada perbedaan norma, tata nilai, sikap dan perbuatan warga antar masyarakat di Indonesia, tetapi tingkah laku normatif mereka cenderung menunjukkan tatanan sosial yang terintegrasi, baik dalam masyarakat masing-masing suku bangsa maupun masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Di dalam masyarakat yang terintegrasi itu, masing-masing bagian atau lembaga sosial berfungsi menyangga terwujudnya tatanan dan ketertiban sosial secara keseluruhan yang terorganisasi secara tetap dan berkesinambungan dalam jangka waktu yang lama.

Ketertiban dan keteraturan sosial di Indonesia berlangsung karena hubungan-hubungan antar posisi-posisi sosial dalam masyarakat dicerminkan oleh interaksi antar individu yang berdasarkan pada tata krama normatif yang primordial sudah dikukuhkan secara tradisional, maupun pengendali sosial buatan yang dikukuhkan dengan hukum undang-undang dan peraturan pemerintah. Hubungan antar individu menekankan pada prinsip nilai pengendalian diri dengan cara mawas diri, yang pada gilirannya tiap orang harus trampil menguasai emosi agar tidak meledak terbuka. Per-

tengkarannya sebaiknya dihindari, emosi-emosi yang muncul harus dikendalikan atau disembunyikan. Pertengkaran yang terlanjur pecah diselesaikan secara musyawarah, dan bagi yang tidak bisa selesai dapat diredam dalam mekanisme *neng-nengan*, atau mekanisme hukum. Sehingga masyarakat tampak terpelihara damai, rukun dan tenteram.

Tata krama cermin hidup rukun dan sekaligus mengandung nilai hormat dalam hubungan hierarkhis. Nilai-nilai rukun dan hormat berfungsi sebagai pengendali tingkah laku sosial, di mana emosi-emosi individu dikesampingkan. Dengan demikian tata krama pergaulan sosial diharapkan mampu memicu tumbuhnya disiplin nasional. Tata krama yang berorientasi norma tradisional adalah tatanan dan ketertiban spontan, yaitu adat-istiadat pengendalian sosial yang berlaku lokal. Sedangkan masyarakat Indonesia yang majemuk dan modern, serta adanya integrasi fungsional, maka pengendalian birokrasinya memainkan peran yang penting sebagai pengendali sosial tingkat superstruktur.

Integrasi masyarakat di Indonesia tampak jelas terbentuk lantaran berfungsinya tata krama tradisional antar individu yang dimainkan dalam setiap lembaga sosial dan dipayungi dengan sistem pengendalian hukum yang diatur oleh lembaga-lembaga birokrasi seperti ek-

sekutif dan yudikatif yang bersifat memaksa. Kesemuanya ini diwariskan dan diinternalisasikan lewat pendidikan dalam keluarga maupun pendidikan sekolah.

Daftar Pustaka

- Geertz Hildred. 1985. *Keluarga Jawa*. PT. Grafiti Pers: Jakarta.
- Koentjaraningrat. 1969. *Rintangan-Rintangan Mental dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia*. Bharata: Djakarta.
- . 1977. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Penerbit PT Dian Rakyat: Jakarta.
- Kuper, Adam. 1991. *Anthropology and Anthropologists*. Routledge: London and New York.
- Magnis-Suseno, Franz. 1988. *Etika Jawa*. Penerbit PT. Gramedia: Jakarta.
- Martindale, Don. 1978. "The Theory of Social Control", in *Social Control For the 1980s, A Handbook for Order in a Democratic Society*. Edited by Joseph S. Roucek. Greenwood Press: Westport, London, p. 46 - 58.
- Mulder, Nield. 1978. *Mysticism & Everyday Life in Contemporary Jawa*. Singapore University Press: Singapore.
- Mulyadi, dkk. 1990. *Tata Kelakuan di Lingkungan Pergaulan Keluarga dan Masyarakat DIY*. Depdikbud, Ditjen Kebudayaan, Dir. Sejarah Nitra Yogyakarta.
- Sartono Kartodirjo, A. 1978. *Kedudukan dan Peranan Sistem Gotong Royong dalam Perkembangan Masyarakat Indonesia*. Lembaga studi Pedesaan dan Kawasan UGM: Yogyakarta.